

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR

Ivoni Ike Liando
ivoni.ike19@gmail.com
Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to test the influence of local own source revenue (PAD), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), and profit sharing fund (DBH), Flypaper Effect (FEF) and the numbers of the population (JPE) to the local expenditure (BED). Sample consisted of 29 districts and 9 in East Java with 148 observation reports Actual Budget and Expenditure 2012-2015 year, with resources BPK and BPS. This examination has been carried out by using multiple linear regressions analysis technique and the instrument of SPSS application (Statistical Product and Service Solutions). The result of the research which has been done by using multiple linear regressions shows that local own source revenue (PAD), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), and profit sharing fund (DBH), Flypaper Effect (FEF) and the numbers of the population (JPE) to the local expenditure (BED). Meanwhile, the flypaper effect does not give any influence to the local expenditure, with the R-Squared 0.988 or 98.8%, it shows that the variables in the models are able to predict the local expenditure, meanwhile 1.2% is influenced by other variables which are included in the model.

Keywords: Local own source revenue (PAD), Equalization fund, Flypaper Effect (FEF), The numbers of the population (JPE), Local expenditure (BED)

ABSTRAK

Tujuan penelitian menguji pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), *Flypaper Effect* (FEF) dan Jumlah Penduduk (JPE) terhadap Belanja Daerah (BED). Sampel penelitian terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur dengan 148 observasi Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah tahun 2012-2015, dengan sumber data BPK dan BPS. Pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil Penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk (JPE) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BED). Sedangkan *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, dengan R-Squared 0,988 atau 98,8% bahwa variabel dalam model dapat memprediksi belanja daerah, Sedangkan 1,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Flypaper Effect*, Jumlah Penduduk, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan dikeluarkan Undang-Undang (UU No.22 Tahun 1999) tentang pemerintah daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, kemudian telah diperbarui menjadi UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Kedua UU tersebut mengatur tentang pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Terdapat juga UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, yaitu dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola sendiri urusan kegiatan pemerintahnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah memiliki peran dalam upaya pemberdayaan daerah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi daerah guna mengelola pemerintahan daerah dan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri. Pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan peraturan untuk memerintah dan mengatur segenap sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Saragih, 2005:73).

Dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah. Desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakasa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2002:25)

Masalah timbul seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah pusat untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. Untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan cara membuka kesempatan berinvestasi untuk para investor.

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diharapkan dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui meningkatnya pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam membangun daerahnya masing-masing. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak atau retribusi, dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, masalah yang timbul adalah kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah pusat untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah tersebut harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan

publik. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak, dapat membantu meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi yang berpengaruh pada pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah, *flypaper effect* (FEF) berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dan Jumlah Penduduk (JPE) berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), *flypaper effect* (FEF), dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama sedangkan agen sebagai pihak yang terkait atas kontrak perjanjian. Pihak prinsipal yaitu pihak yang membuat tugas suatu kontrak dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak agen yang menerima dan menjelaskan perintah kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal.

Dalam hubungan keagenan di pemerintah antara legislatif dan publik, legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006), dalam hal pembuatan kebijakan, berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politis untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau persepsi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No.33 Tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada hakekatnya APBD adalah salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesenjangan masyarakat di daerah.

APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Nordiawan *et al.*, 2007) yang dimaksud dengan fungsi otoritas yaitu APBD yang harus bisa dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan yaitu APBD digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan yaitu APBD digunakan sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi, berhubungan dengan APBD yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, APBD merupakan kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. APBD juga memiliki fungsi sebagai stabilitas yaitu alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 yang menyatakan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat karena dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan ikut meningkat. Menurut Darise (2008:22) strategi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga program unggulan sebagai berikut: Pengembangan SDM, Pembangunan sektor pertanian, dan Pembangunan bidang perikanan dan kelautan.

Menurut Erlina *et al.*, (2015: 111) Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pemendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : (1) Pajak Daerah, Menurut UU No.28 Tahun 2009 disebutkan pajak daerah yang selanjutnya pajak adalah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Retribusi Daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum untuk provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah Kabupaten/Kota. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Bastian, 2001:261): (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN, (2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas, (3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah Kabupaten/ Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh Kabupaten/ Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, (4) Porsi daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan

urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008: 137-138).

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk memadai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Flypaper Effect

Jika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/ grants yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional grants*) dari pada pendapatan asli daerahnya sehingga akan menimbulkan pemborosan dalam belanja daerah, maka disebut dengan *Flypaper effect* atau lebih dikenal dengan kertas kerja layang. Fenomena *Flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Anomali yang timbul tersebut mengasikkan dua aliran pemikiran dari pengamat ekonomi mengenai telaah *Flypaper effect*, yaitu: (1) Model Birokratik (*bureaucratic model*); Kuncoro (2007:6-8) menyatakan bahwa Pemikiran birokratik berpandangan posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik dimana berusaha untuk memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Model birokratik juga menegaskan *Flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang leluasa untuk membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak, (2) Model Ilusi Fiskal (*fiscal illusion model*); Shinta, 2009 (dalam Prahesti, 2014:13) menyatakan bahwa ilusi fiskal terjadi saat pembuatan keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Maksud dari penjelasan diatas dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak atau retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana dalam jumlah yang lebih besar. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

Asumsi penentuan terjadinya *Flypaper effect* pada penelitian ini fokus pada perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Melo (2002) dan Venter, (2007) dalam Rahmawati (2015:4) menyatakan bahwa *Flypaper effect* terjadi apabila: (1) Pengaruh atau nilai koefisiensi DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah, dan nilai keduanya signifikan, (2) Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap belanja daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *Flypaper effect*.

Jumlah Penduduk

Penduduk menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah mereka yang sudah menetap disuatu wilayah paling sedikit enam bulan atau kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas (Kelahiran), mortalitas (Kematian) dan migrasi.

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Disamping itu, penambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah dan makin kompleksnya kebutuhan. Kependudukan memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain: (1) Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dan pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas, (2) Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Dan ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Belanja Daerah

Menurut UU No.33 Tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah yang dimaksud terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Menurut Darise (2008:138) Belanja urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertahanan, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan perempuan, Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera, Sosial, Ketenaga kerjaan, Koperasi, dan usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan olah raga, Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, Statistik, Arsip, dan Komunikasi dan Informatika.

Menurut Darise (2008:138) Belanja urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Pariwisata, Kehutanan dan perikanan, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menjadi tiga jenis belanja yang terdiri dari: (1) Belanja pegawai (2) Belanja Barang dan Jasa (3) Belanja Modal.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang di anggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/ atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: (1) Belanja Pegawai (2) Belanja Bunga (3) Belanja Subsidi (4) Belanja Hibah (5) Bantuan Sosial (6) Belanja Bagi Hasil (7) Bantuan Keuangan (8) Belanja Tidak terduga.

Penelitian Terdahulu

Maimunah (2006) meneliti tentang “*Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Namun, DAU lebih dominan dalam mempengaruhi besarnya nilai Belanja Daerah yang berarti *Flypaper effect* terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

Masdjoko dan Sukartono (2009) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dan Analisis *Flypaper effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH berpengaruh positif terhadap BD dan diterima secara signifikan sedangkan DAK berpengaruh positif terhadap BD namun tidak signifikan. Dan telah terjadi *Flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Rahmawati (2015) meneliti tentang “*Flypaper Effect*, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari Dana Alokasi Umum sehingga tidak terjadi *Flypaper Effect*.

Amalia (2015) meneliti tentang “Analisis *Flypaper effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Banten” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sementara itu pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian dengan variabel yang digunakan menunjukkan tidak terjadi *Flypaper Effect* pada kabupaten dan Kota di provinsi banten pada tahun 2010-2013.

Sasana (2011) meneliti tentang “Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik regional bruto riil berhubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana perimbangan berhubungan positif dengan belanja daerah, dan mempengaruhi belanja daerah, Jumlah penduduk berhubungan positif

dengan belanja daerah, dan mempengaruhi belanja daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berhubungan positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan suatu daerah adalah pendapatan asli daerah. Melihat beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Berarti menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut mampu untuk mandiri, dan begitu pula sebaliknya.

Penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sudah banyak dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009); Maimunah (2006); Afrizawati (2012) membuktikan bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi peningkatan pula pada jumlah belanja daerah yang dikeluarkan. Dengan kata lain jumlah PAD mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari dana perimbangan antar tingkat pemerintah. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.

Dalam konteks internasional studi tentang pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah telah banyak dilakukan salah satunya oleh Legrensi dan Milas (dalam Maimunah, 2006:4) dengan menggunakan sampel *Municipalities* di Italia, Legrensi dan Milas menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah. Semakin sedikit dana alokasi umum dapat disimpulkan bahwa ketergantungan daerah tersebut dalam memenuhi belanja daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan. Bila DAU meningkat dari setiap tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja daerah lebih besar dari kenaikan DAU. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh maimunah (2006); Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan bahwa peningkatan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah yang berarti bahwa peningkatan DAU diikuti dengan peningkatan yang lebih besar pada belanja daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional. Dana alokasi khusus dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Masdjojo dan Sukartono (2009) meneliti tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dan Analisis *Flypaper effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008" berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini juga sejalan yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh *Flypaper Effect* Terhadap Belanja Daerah

Flypaper Effect adalah suatu kondisi dimana komposisi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah lebih besar bersumber dari DAU daripada PAD. *Flypaper Effect* terjadi karena kepentingan pemerintah daerah untuk meningkatkan bantuan dari pemerintah daerah dengan cara meningkatkan anggaran belanjanya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kemalasan fiskal daerah karena pemerintah daerah akan lebih memilih mengupayakan perolehan DAU yang lebih besar daripada kerja keras untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Flypaper effect* berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah. Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan (Devita *et al.*, 2014:65). Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah. Serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah, sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

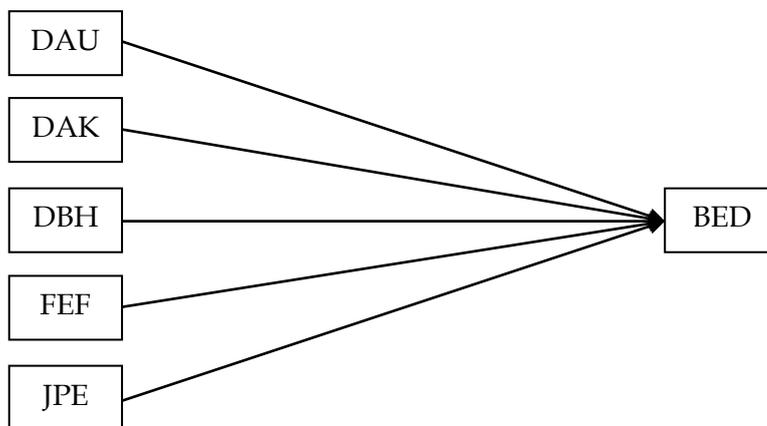
Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, agar kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik. Dan supaya

pertumbuhan ekonomi lebih baik, maka pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan. Sehingga, Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menyebabkan belanja daerah akan semakin meningkat. Dimana salah satu tujuan dari penganggaran belanja daerah tersebut yaitu tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasana (2011) meneliti tentang “Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal” menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan belanja daerah, dan mempengaruhi belanja daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₆: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Model Penelitian

Dari hasil perumusan hipotesis dapat ditarik model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dan obyek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Jumlah Penduduk dalam Jatim.bps.go.id Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten, lengkap, dan jelas dari tahun 2012 hingga 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis Data Dokumenter yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2012 hingga tahun 2015.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder yang diperoleh dari situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah (*www.djpk.go.id*). Selain itu data tersebut juga diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi Jawa Timur yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dan pada *Jatim.bps.go.id* yang berupa Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder, yang dimana menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan, pengumpulan, pencatatan, dan perhitungan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Selain dengan dokumentasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian baik dari buku, arsip, maupun hasil penelitian terdahulu.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel terikat (dependen variabel) dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah, sedangkan variabel bebas (independen variabel) adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Flypaper Effect* dan Jumlah Penduduk.

Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk menghitung rasio diukur dengan rumus (Ardiansyah, 2014):

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan juga untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Putro dan Pamuji, 2010 (dalam Permatasari, 2016:5) dan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ kota dapat dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Dimana,

Alokasi Dasar = Gaji PNS daerah

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap kabupaten/kota berasal dari bobot DAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut Usman et al, 2008 (dalam Permatasari, 2016:5):

Bobot DAK = Bobot Daerah + Bobot Teknis

Keterangan:

Bobot Daerah = Indeks Fiskal dan Wilayah × Indeks Kelemahan Konstruksi

Bobot Teknis = Indeks Teknik × Indeks Kelemahan Konstruksi

4. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU No.33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil berasal dari pajak dan kekayaan daerah. Maka rasio untuk yang digunakan untuk menghitung Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH Sumber Daya Alam}$$

5. *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan fenomena dimana pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU, dari pada menggunakan kemampuannya sendiri yang diprosikan dengan PAD. Ketika koefisien DAU lebih besar pengaruhnya signifikansi terhadap Belanja Daerah daripada PAD maka, situasi ini disebut *Flypaper Effect*. Atau dapat difungsikan jika $b_1 > b_2$ berarti $\frac{b_1}{b_2} > 1$ maka terjadi *Flypaper Effect*, dan sebaliknya (Afrizawati, 2012).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dummy, dengan memodifikasi sistem penilaian dengan memberikan nilai 1 apabila terjadi *Flypaper Effect* dan nilai 0 apabila tidak terjadi *Flypaper Effect*.

6. Jumlah Penduduk

Penduduk menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah mereka yang sudah menetap disuatu wilayah paling sedikit enam bulan atau kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu daerah per satuan luas (Putra,2012). Kepadatan penduduk disuatu daerah ini dapat dihitung dengan rasio:

$$\text{Kepadatan Penduduk: } \frac{\text{jumlah penduduk suatu wilayah}}{\text{luas wilayah (dalam km}^2\text{)}}$$

7. Belanja Daerah

Menurut UU No.33 Tahun 2004, Belanja daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk menghitung rasio Belanja Daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tak Terduga} + \text{Transfer}$$

Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), *Flypaper Effect* (FEF) dan Jumlah Penduduk (JPE) terhadap Belanja Daerah. Formulasi regresi berganda adalah

$$BED = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \beta_5 FEF + \beta_6 JPE + e$$

Dimana:

- BED = Belanja Daerah
- α = Konstanta
- β = Slope atau koefisien regresi
- PAD = Pendapatan Asli daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- DBH = Dana Bagi Hasil
- FEF = *Flypaper Effect*
- JPE = Jumlah Penduduk
- e = error

Sampel Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, jumlah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur adalah 38 Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten Bangkalan tahun 2014 dan 2015, Kabupaten Sumenep tahun 2014, dan Kota Madiun tahun 2015 tidak menjadi sampel penelitian karena tidak diberikan oleh sumber (Badan Pemeriksa Keuangan).

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	2012	2013	2014	2015	Total
Laporan Realisasi Anggaran (38 Kota/Kabupaten)	38	38	38	38	
Total Laporan Realisasi Anggaran yang tidak diberikan oleh sumber	(0)	(0)	(2)	(2)	148
Jumlah sampel akhir	38	38	36	36	

Sumber: BPK RI Provinsi Jawa Timur

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berikut ini disajikan hasil perhitungan SPSS tentang statistik deskriptif:

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (Juta)	148	38.794	4.035.649	289.391,43	516.250,48
DAU (Juta)	148	309.102	1.613.161	832.143,89	276.530,11
DAK (Juta)	148	424	204.576	65.360,43	33.962,18
DBH (Juta)	148	13.596	994.881	99.924,84	113.319,61
FEF	148	0,00	1,00	0,96	0,18
JPE (jiwa/km ²)	148	272,30	8.463,46	2.013,94	2.304,81
BED (Juta)	148	435.188	6.490.359	1.593.966,09	880.860,26
Valid N (listwise)	148				

Sumber: Data sekunder diolah

Pada Tabel 2 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 38.794 Juta dan nilai maksimum Rp 4.035.649 Juta. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 289.391,43 Juta dan memiliki standar deviasi sebesar Rp 516.250,48 Juta. Lebih besarnya nilai standar deviasi dibanding nilai mean menunjukkan bahwa data cenderung berdistribusi tidak normal.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp 309.102 Juta dan nilai maksimum sebesar Rp 1.613.161 Juta. Sedangkan nilai rata-rata (mean) dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 832.143,89 Juta dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 276.530,11 Juta. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding nilai mean menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki nilai minimum sebesar Rp 424 Juta dan nilai maksimum sebesar Rp 204.576 Juta. Sedangkan nilai rata-rata (mean) dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 65.360,43 Juta dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 33.962,18 Juta. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding nilai mean menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa Dana Bagi Hasil memiliki nilai minimum sebesar Rp 13.596 Juta dan nilai maksimum sebesar Rp 994.881 Juta. Sedangkan nilai rata-rata (mean) dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp 99.924,84 Juta dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 113.319,61 Juta. Lebih besarnya nilai standar deviasi dibanding nilai mean menunjukkan bahwa data cenderung berdistribusi tidak normal.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa *Flypaper Effect* nilai minimum diperoleh Kota Surabaya pada Tahun 2015 sebesar 0,28, Rendahnya *Flypaper Effect* yang dimiliki Kota Surabaya menunjukkan bahwa kecilnya ketergantungan Kota Surabaya dalam membiayai belanja daerahnya atau dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan *Flypaper Effect* dengan nilai maksimum sebesar 12,59 diperoleh Kabupaten Ngawi pada Tahun 2012 sebesar 12,59, Tingginya *Flypaper Effect* yang dimiliki Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa besarnya ketergantungan Kabupaten Ngawi dalam membiayai belanja daerahnya atau dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ngawi sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dari data penelitian yang telah dikumpulkan selama 4 tahun diperoleh nilai rata-rata (mean) *Flypaper Effect* sebesar 0,96 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,18. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding nilai mean menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa Jumlah Penduduk memiliki nilai minimum sebesar 272,30 jiwa (dalam km²) dan nilai maksimum sebesar 8.463,46 jiwa (dalam km²). Sedangkan nilai rata-rata (mean) dari Jumlah Penduduk sebesar Rp 2.013,94 Juta dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 2.304,81 Juta. Lebih besarnya nilai standar deviasi dibanding nilai mean menunjukkan bahwa data cenderung berdistribusi tidak normal.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 435.188 Juta dan nilai maksimum sebesar Rp 6.490.359 Juta. Sedangkan nilai rata-rata (mean) dari Belanja daerah sebesar Rp 1.593.966,09 Juta dan nilai standar deviasi sebesar Rp 880.860,26 Juta. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding nilai mean menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan *P-plot* grafik terlihat bahwa penyebaran titik-titik mengikuti arah garis diagonal, namun titik-titik menyebar jauh disekitar garis diagonal. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau dengan kata lain model regresi layak dipakai karena memenuhi salah satu asumsi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penyebaran titik-titik yang mengikuti garis diagonal.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Hasil pengujian normalitas terhadap 148 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* sebesar 0,192 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinieritas

Dari hasil yang telah dianalisis dan diuji dapat diketahui bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, *Flypaper Effect* dan Jumlah penduduk memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance value* diatas 0,10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak ada yang mengandung adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Menurut Suliyanto (2011) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut (*times-series*) atau ruang (*cross section*). Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,822 terletak diantara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama (*konstan*) atau yang bisa disebut homokedastisitas. Berdasarkan tampilan pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Estimasi Koefisien Regresi

		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-112.917,699	102.980,889		-1,096	,275
	PAD	1.104	,039	,647	28.206	,000
	DAU	1.408	,044	,442	31.836	,000
	DAK	1.815	,311	,070	5.832	,000
	DBH	1.115	,076	,143	14.736	,000
	FEF	-39.982,813	-98.213,200	-,008	-,407	,685
	JPE	12.121	4,117	,032	2.847	,005

a. Dependent Variable: BED

Sumber: Data sekunder diolah

Dari hasil output SPSS seperti pada Tabel 3 diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BED = -112.917,699 + 1.104PAD + 1.408DAU + 1.815DAK + 1.115DBH - 39.982,813FEF + 12.121JPE + e$$

Goodness of Fit (uji F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).

Tabel 4
Hasil Perhitungan Goodness of Fit (uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	112769281818887,970	6	18794880303147,992	2054,015	,000 ^b
	Residual	1290194429924,677	141	9150315105,849		
	Total	114059476248812,640	147			

a. Dependent Variable: BED

b. Predictors: (Constant), JPE, DBH, DAK, FEF, DAU, PAD

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4 diatas diketahui nilai F_{hitung} sebesar 2.054,015 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai F memberikan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, *Flypaper Effect* dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variansi perubahan pada variabel dependen. Berikut ini hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994 ^a	,988	,988	95.657,279	1.822

a. Predictors: (Constant), JPE, DBH, DAU, FEF, DAK, PAD

b. Dependent Variable: BED

Sumber: Data sekunder diolah

Nilai koefisiensi determinasi atau *R square* dalam penelitian ini sebesar 0,989 atau sebesar 98,8%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu PAD, DAU, DAK, DBH dan JPE selama 2012-2015 mempengaruhi variabel terikat (BED) adalah sebesar 98,8% dan sisanya sebesar 1,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, *Flypaper Effect* dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. Dengan tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Hasil Perhitungan Uji t

Model Anova	t_{hitung}	Sig
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28.206	,000
Dana Alokasi Umum (DAU)	31.836	,000
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.832	,000
Dana Bagi Hasil (DBH)	14.736	,000
<i>Flypaper Effect</i> (FEF)	-,407	,685
Jumlah Penduduk (JPE)	2.847	,005

a. Dependent Variable: BED

Sumber: Data sekunder diolah

Pada Tabel 6 Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 28.206 dengan tingkat signifikan 0,000 nilai signifikan tersebut < 0.05 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pada Tabel 6 Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 31.836 dengan tingkat signifikan 0,000 nilai signifikan tersebut < 0.05 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pada Tabel 6 Pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5.832 dengan tingkat signifikan 0,000 nilai signifikan tersebut < 0.05 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang berarti bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pada Tabel 6 Pengaruh variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 14.736 dengan tingkat signifikan 0,000 nilai signifikan tersebut < 0.05 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima yang berarti bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pada Tabel 6 Pengaruh variabel *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,407 dengan tingkat signifikan 0,685 nilai signifikan tersebut >0.05 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_5 ditolak yang berarti bahwa variabel *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pada Tabel 6 Pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.847 dengan tingkat signifikan 0,005 nilai signifikan tersebut <0.05 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_6 diterima yang berarti bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pembahasan

Uraian berikut ini tentang pembahasan tentang hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil perhitungan Uji t diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai pengaruh berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015); Amalia (2015); Masdjojo dan Sukartono (2009); Maimunah (2006) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Maka dari itu semakin tinggi DAU yang diperoleh dari pemerintah pusat maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2011); Amalia (2015); Masdjojo dan Sukartono (2009); Maimunah (2006) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja daerah yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.

Tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Setiap daerah berhak menggunakan seberapa banyak DAK yang digunakan sesuai dengan porsi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerah sendiri.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2011) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa apabila dana bagi hasil yang diterima oleh daerah tinggi, maka semakin tinggi pula belanja daerah yang dialokasikan oleh daerah tersebut.

Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Maka semakin tinggi dana bagi hasil yang diperoleh maka semakin tinggi pula anggaran belanja daerah yang dapat dianggarkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2011); Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang diterima oleh suatu daerah semakin tinggi maka dana yg dikeluarkan untuk anggaran belanja daerah semakin rendah. Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tujuannya untuk pemerataan keuangan daerah, dan dana tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Flypaper Effect merupakan respon pemerintah daerah dalam menggunakan Dana Alokasi Umum yang lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerahnya. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya *Flypaper Effect* dengan melihat hasil uji t dengan salah satu kriteria sebagai berikut: (1) Apabila variabel Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan (2) Dengan membandingkan nilai hasil uji t antara Dana Alokasi Umum dengan nilai hasil uji t Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil penelitian hanya Kota Surabaya Tahun 2012-2015 dan Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2015 yang tidak membuktikan terjadinya *flypaper effect*, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya terjadi *flypaper effect*. Untuk mengetahui terjadi *flypaper effect* peneliti memberi angka 1, dan nilai 0 untuk sebaliknya.

Menurut Afrizawati, 2012 Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota seperti: (1) Menyebabkan celah kepincangan fiskal (*Fiscal gap*) akan tetap ada. *Fiscal gap* merupakan kerangka kebijakan Pemerintah pusat dalam memberikan DAU kepada daerah, maka jika terjadi *flypaper effect* artinya pencapaian pemberian dana transfer kurang optimal (2) Menimbulkan ketidaktaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD (3) Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada Pemerintah pusat tetap ada, karena secara langsung pemberian DAU kepada daerah yang berarti Pemerintah Pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban pembiayaan, sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri (4) Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer dimana seharusnya pemerintah pusat membuat kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah dalam rangka memonitor, mengontrol dan mengevaluasi penggunaan dana DAU, hal ini di perlukan untuk mencegah respon yang berlebihan dalam menyingkapi penerimaan DAU di daerah

(5) Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2012-2015 *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2015) yang menyatakan bahwa *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Namun penelitian ini tidak mendukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maimunah, 2006) yang menemukan bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh pada Belanja Daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jika jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Karena meningkatnya jumlah penduduk menurut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2011) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Flypaper Effect* dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. Jumlah Sampel dalam penelitian ini berjumlah 148 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari periode 2012-2015. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Seluruh Variabel independen dalam model secara simultan memiliki kemampuan prediksi dengan R-Squared 0,989 atau 98,9% dapat memprediksi Belanja Daerah. Sedangkan 1,2 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain: (1) Untuk dapat meningkatkan belanja daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (2) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas, peneliti selanjutnya yang akan datang diharapkan lebih menambahkan variabel independen yang lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja daerah, seperti ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kondisi makro ekonomi atau kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati, 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)* 2(1): 21-30.
- Amalia, F. 2015. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 11(1): 15-25.

- Ardiansyah, O. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 3(4): 1-18.
- Badan Pemeriksa keuangan. 2012-2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2015. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah. <http://jatim.bps.go.id>. 23 Januari 2017.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Cetakan Pertama. PT Indeks. Jakarta.
- Devita, A., A. Delis, dan Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 2(2): 63-70.
- Erlina, O.S. Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1): 53-64.
- Kuncoro, H. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*. 26-28 Juli: 1-29.
- Maimunah, M. 2006. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. 23-26 Agustus: 1-27.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.
- Masdjoko, G.N. dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *TEMA* 6(1): 32-50.
- Nordiawan, D. I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(1): 1-17.
- Prahesti, A.I. 2014. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Bondowoso. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 3(5): 1-19.
- Putra, A.A Ngr. 2012. Analisis sistem informasi geografis kepadatan penduduk kota Denpasar dengan menggunakan *arc view 3.3*. *Jurnal elektronik ilmu komputer* 1(2): 35-47.
- Rahmawati, L.A. 2015. *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(9): 1-20.
- Saragih, J. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, H. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18(1): 46-58.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Edisi Satu. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.

- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 126. Jakarta.